

## **Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten MukoMuko**

**Yayang Amelisa Pratiwi<sup>1</sup>, Faizal Anwar<sup>2</sup>, Sri Indarti<sup>3</sup>, Rekho Adriadi<sup>4</sup>**  
<sup>1,2,3,4</sup>Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Bengkulu  
E-mail: yayangamelisa29@gmail.com

**Abstract:** The big goal of the State of Indonesia is the welfare of the community, to realize this it is important to have supporting facilities. One of the facilities that can support the realization of this is the existence of Village Owned Enterprises (BUMDes). BUMDes as a village economic strengthening that is engaged in social and economic fields and as a service provider to rural communities, especially regarding the business sector. This research is to see how the impact of BUMDes on the welfare of the community in Air Buluh Village, Ipuh District, Mukomuko Regency. The research method used in this descriptive qualitative research, primary and secondary data sources. The results of the study show that the more small and medium enterprises are growing, the average family member has a high school education, the village community gets adequate health services.

**Keywords:** Village Owned Enterprises, Community Welfare

**Abstrak:** Tujuan besar Negara Indonesia adalah mensejahterakan masyarakat, untuk mewujudkan hal tersebut penting adanya sarana pendukung. Salah satu sarana yang dapat mendukung terwujudnya hal tersebut adalah adanya keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes sebagai penguatan ekonomi desa yang bergerak di bidang sosial dan ekonomi dan sebagai penyedia layanan terhadap masyarakat desa utamanya mengenai bidang usaha. Penelitian ini untuk melihat bagaimana dampak BUMDes pada kesejahteraan masyarakat di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif, sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin banyak usaha kecil menengah semakin tumbuh, anggota keluarga rata-rata berpendidikan SMA, masyarakat desa mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.

**Kata kunci:** Badan Usaha Milik Desa, Kesejahteraan Masyarakat

## PENDAHULUAN

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan membangun kemandirian, termasuk pembangunan pedesaan. Salah satu misi pemerintah adalah membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan, ketersediaan sarana dan fasilitas untuk mendukung ekonomi pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan. Tujuannya, adalah untuk memberi peluang bagi kemampuan daerah dan pedesaan sebagai tulang punggung ekonomi regional dan nasional (Dimas, 2019).

Kemajuan ekonomi nasional hanya akan tercapai jika terdapat iklim perekonomian yang baik di tingkat provinsi. Kemajuan ekonomi di tingkat provinsi akan tercapai jika kabupaten memiliki kegiatan ekonomi yang baik. Kemajuan ekonomi sebuah kabupaten dapat tercapai karena adanya sumbang sih dari ekonomi pedesaan yang kuat yang berimbas pada kesejahteraan masyarakat luas. Hal ini akan menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk diterapkan di semua tingkat pembangunan dan keputusan berdasarkan kebutuhan nyata dari masyarakat. Pembangunan pedesaan merupakan salah satu cara dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia (Diantika, 2013)

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian (Sandiasa, 2017: 64).

Berdasarkan asumsi itulah maka sudah seharusnya eksistensi desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan lahirnya kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dengan cara menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu pemerintah menerapkan pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes ) sebagai salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian perekonomian desa (Diantika, 2013)

BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Kedepan BUMDes akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Yanuardi, 2013).

Pemerintah desa berharap dengan hadirnya BUMDes ini dengan unit-unit usaha yang ada di dalamnya dapat membantu warga dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui pembangunan-pembangunan ekonomi desa secara utuh. Selain itu semakin majunya BUMDes dikhawatirkan menimbulkan perilaku bisnis bagi pengelolanya yang hanya mengejar keuntungan semata dan melupakan tujuan utama dari BUMDes sendiri yaitu mensejahterakan masyarakatnya.

Desa Air Buluh, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko merupakan desa yang sudah mempunyai BUMDes dan telah berjalan selama lima tahun. Kebutuhan dana bagi pengembangan Desa Air Buluh diperoleh dari keuntungan badan usaha milik desa (BUMDes) Air Buluh. BUMDes Desa Air Buluh mempunyai unit-unit usaha di dalamnya. Salah satu diantaranya adalah dengan adanya BUMDes Maju Bersama yang bergerak di bidang kredit mikro atau simpan pinjam, kontraktor pengadaan sirtu (pasir dan batu), dan masih banyak unit-unit usaha yang ada di dalamnya namun belum semua berjalan dengan efektif.

BUMDes Air Buluh secara resmi berdiri pada tahun 2016. Pendirian BUMDes Air Buluh diprakarsai oleh masyarakat desa Air Buluh bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Mukomuko dan Pemerintah Provinsi Daerah Provinsi Bengkulu. Selanjutnya BUMDes Air Buluh ini cukup berkembang dan mampu untuk memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat desa, seperti dampak terhadap kesehatan, pendidikan, dan dampak terhadap ekonomi. Pada awalnya modal BUMDes kurang lebih dari 50.000.000 dan setelah berjalannya BUMDes tersebut terjadi peningkatan sebanyak 250.000.000,00 dari tahun 2017-2020. Berangkat dari titik tolak tersebut penulis merasa perlu untuk mengangkat isu ini sebagai sebuah tema dalam penelitian yang berjudul Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti dengan penjelasan secara terperinci tentang permasalahan yang berhubungan dengan teori dan data yang ada, sehingga mendapat suatu kesimpulan” (Suyanto,2005 : 166). Sedangkan penelitian deskriptif dalam hal ini mengidentifikasi lingkungan internal dan eksternal Desa Air Buluh sehingga dapat menemukan dampak adanya kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes ) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penulis memilih lokasi penelitian di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Pemilihan lokasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi. yang kaya dengan data-data penunjang untuk penelitian ini sehingga dapat membantu permasalahan yang ada dilokasi penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi yang bertujuan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, dan benda serta rekaman gambar dimana observasi dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan teknik observasi, memungkinkan peneliti untuk mengamati dari dekat masalah yang akan diteliti. Teknik wawancara digunakan peneliti untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab sehingga dapat dikerucutkan dalam sebuah kesimpulan dan menggali data terkait dampak BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten MukoMuko.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dampak kebijakan publik merupakan sebuah studi evaluasi terhadap suatu kebijakan pemerintah yang sudah diimplementasikan kepada sasaran kebijakan. Dalam setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pasti memiliki tujuan-tujuan. Dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan diharapkan akan membuat keadaan masyarakat menjadi lebih baik. Setiap kebijakan pasti menimbulkan suatu dampak bagi sasaran kebijakan. Begitu pun dengan kebijakan BUMDes bagi kesejahteraan masyarakat di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten MukoMuko. Dampak yang ditimbulkan dari kebijakan dapat diketahui dengan cara mengevaluasi kebijakan tersebut setelah diimplementasikan.

Kebijakan BUMDes ini dikeluarkan dengan tujuan salah satunya adalah untuk

mensejahterakan masyarakat desa. Bentuk dari BUMDes ini adalah suatu lembaga ekonomi yang dikelola seluruhnya oleh masyarakat desa. Dengan kebijakan ini, diharapkan dapat member dampak di bidang ekonomi, kesehatan, dan pembangunan yang berorientasi pada masyarakat.

Dengan adanya modal usaha ini, pengangguran di Desa Air Buluh berkurang. Hal ini dikarenakan kebutuhan akan modal usaha untuk persawahan dan usaha sampingan serta mengembangkan usaha lainnya tercukupi, masyarakat sekarang mudah mendapatkan modal usaha untuk mengembangkan usahanya. Hal ini juga menimbulkan peningkatan banyaknya warga yang berpencaharian sebagai petani dan peternak. Tidak hanya di bidang persawahan dan peternakan ya, usaha perikanan pun tercipta dan setiap tahun terus meningkat, sampai sekarang sudah terdapat 60% warga mempunyai usaha perikanan. Dengan demikian pengembangan BUMDes di pedesaan telah membuka peluang usaha bagi masyarakat yang mampu untuk menerima memanfaatkan peluang usaha tersebut.

Dengan adanya unit usaha UKM Maju Bersama, mata pencaharian masyarakat tidak lagi terbatas pada sektor primer yaitu petani dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, tetapi telah memperluas ruang gerak usahanya pada sektor tertier. Suatu peluang usaha akan menjadi sumber pendapatan yang memberikan tambahan penghasilan kepada masyarakat jika mampu menangkap peluang usaha yang potensial dikembangkan menjadi suatu kegiatan usaha yang nyata. Dengan demikian kemampuan masyarakat memanfaatkan peluang yang ada akan dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat dalam menangkap peluang itu sendiri.

Modal usaha merupakan salah satu kebutuhan untuk meningkatkan usaha masyarakat dan meningkatkan penghasilan masyarakat. Jika tidak ada modal usaha, kebutuhan masyarakat untuk hidup sehat dan gizi yang cukup akan terganggu karena pendapatan masyarakat yang kecil. Hal tersebut tentunya akan mengakibatkan kesehatan masyarakat akan kurang baik. Pada saat sebelum adanya BUMDes hal tersebut sudah menjadi pemandangan yang sudah biasa di Desa Air Buluh, tetapi sekarang sudah tidak terlihat. Melalui BUMDes dengan unit usaha UKM Maju Bersama, masyarakat yang sebelum adanya BUMDes mengalami kekurangan tambahan gizi dan kesehatan yang cukup sekarang kebutuhan akan gizi dan kesehatan tercukupi dalam hidup sehari-hari.

Selain masalah kebutuhan modal usaha untuk pertanian dan kebutuhan masyarakat untuk hidup sehat serta gizi yang cukup, kebutuhan pendidikan yang baik

dibidang pengetahuan dan wawasan sangat juga harus di pertimbangkan. Karena rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan mempunyai dampak yang negative terhadap kemajuan dan perkembangan desa, pendidikan merupakan salah satu kebutuhan untuk meningkatkan kemajuan masyarakat dan meningkatkan penghasilan dan kesehatan masyarakat. Jika tingkat pendidikan rendah maka akan mempengaruhi masyarakat untuk mengembangkan usaha dan hidup sehat dan gizi yang cukup. Hal tersebut tentunya akan mengakibatkan kemajuan masyarakat akan kurang baik. Pada saat sebelum adanya BUMDes hal tersebut sudah menjadi pemandangan yang sudah biasa di Desa Air Buluh, tetapi sekarang sudah tidak terjadi lagi. Melalui BUMDes dengan unit usaha UKM Maju Bersama, masyarakat yang sebelum adanya BUMDes mengalami kekurangan pengetahuan sekarang kebutuhan akan pengetahuan untuk mengembangkan usahanya dan pengetahuan untuk hidup sehat telah tercukupi.

## **PEMBAHASAN**

Pembangunan merupakan usaha perubahan untuk menuju keadaan yang lebih baik. Salah satu misi pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang lebih baik bagi negara adalah melalui pembangunan pedesaan. Pembangunan desa memegang peranan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Dengan kata lain, sesungguhnya makna pembangunan negara dan bangsa adalah pembangunan desa sebagai wajah yang nyata, bersifat lokalitas dan patut dikedepankan.

Membangun daerah pedesaan dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan, ketersediaan sarana dan fasilitas untuk mendukung ekonomi pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan. Tujuannya adalah untuk memberi peluang bagi kemampuan daerah dan pedesaan sebagai tulang punggung ekonomi regional dan nasional. Wujud dari pembangunan desa adalah adanya berbagai program dan proyek pembangunan yang bertujuan menciptakan kemajuan desa. Dengan demikian, program dan proyek itu tidak hanya untuk mencapai kemajuan fisik saja, tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat sangat erat kaitannya dengan partisipasi masyarakat desa guna kelancaran dalam proses pembangunan serta adanya ketepatan sasaran tujuan pembangunan. Keterlibatan masyarakat akan terlihat dari inisiatif masyarakat dalam pembangunan baik dalam bentuk pikiran, tenaga, maupun bantuan moril. Dalam

usaha memberdayakan masyarakat dalam proses pembangunan desa, pemerintah perlu membentuk sebuah lembaga yang menjadi wadah bagi kegiatan masyarakat tersebut.

Kelembagaan sebagai organisasi biasanya merujuk pada lembaga- lembaga formal seperti departemen dalam pemerintah, koperasi, bank dan sebagainya. Keberadaan lembaga di pedesaan memiliki fungsi yang mampu memberikan energi sosial yaitu sebuah kerjasama diantara segenap komponen, karena kerja sama mutlak dibutuhkan dalam kelembagaan yang mengarah pada pembangunan. Kerja sama antara seluruh elemen ini menjadi sebuah keharusan. Hal ini merupakan kekuatan internal masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah mereka sendiri. Peran kelembagaan sangat penting dalam mengatur sumberdaya dan distribusi manfaat, untuk itu unsur kelembagaan perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan potensi desa guna menunjang pembangunan desa.

Dengan melalui kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kelembagaan perekonomian yang dikeluarkan pemerintah yang berorientasi terhadap pembangunan desa, membantu pemerintah desa beserta masyarakatnya dalam menjalankan kegiatan membangun desa. Kegiatan tersebut sebagai pembelajaran masyarakat dalam mengelola suatu kebijakan. Berbagai program pembangunan yang diorientasikan pada desa melalui lembaga perekonomian sudah banyak dan telah lama diimplementasikan oleh pemerintah namun belum membuahkan hasil yang memuaskan. Hingga pada tahun 2004 dibentuklah kebijakan pemerintah yang berbetuk lembaga perekonomian untuk menanggulangi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yaitu BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).

BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pembentukan BUMDes didasarkan pada kebutuhan, potensi dan kapasitas desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan dan pembentukan BUMDes adalah atas prakarsa masyarakat desa dan terdapat intervensi dari pemerintah desa. Pemerintah pusat hanya mendanai pembentukan BUMDes dan melakukan pengawasan. Keterlibatan pemerintah desa sebagai pendiri BUMDes bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga (baik dari dalam maupun dari luar desa). Pemerintah desa harus ikut berperan pada pembentukan BUMDes sebagai badan hukum yang berpijak pada tata aturan perundang-undangan yang berlaku, serta sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa.

BUMDes juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang dikuasai oleh kelompok tertentu di tingkat desa. Artinya, tata aturan yang terwujud adalah mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas kelembagaan akan mengarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota. Dengan adanya BUMDes diharapkan mampu meningkatkan pembangunan yang berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang nantinya akan menjadi kesejahteraan nasional.

Desa Air Buluh merupakan salah satu desa yang sudah memiliki BUMDes sejak tahun 2016. Perencanaan dan pembentukan BUMDes UKM Maju Bersama ini adalah atas prakarsa dari seluruh masyarakat karena melihat kondisi yang dialami mereka yaitu keterpurukan akibat kekurangan modal usaha yang melanda desa mereka. Pendirian BUMDes ini mendapatkan dana dari pemerintah kabupaten setelah mengajukan proposal. Kemudian dana tersebut dikelola seluruhnya oleh masyarakat desa dan terdapat intervensi dari pemerintah desa. Seperti yang dikemukakan oleh Midgley (1995) yaitu "Ada beberapa aspek dalam pembangunan desa, diantaranya mementingkan proses dan adanya intervensi dari pemerintah." Intervensi yang dimaksud disini adalah adanya perlindungan hukum yang mengatur tentang BUMDes dan pengawasan dari pemerintah desa Air Buluh terhadap kegiatan-kegiatan BUMDes di desa Air Buluh. Meskipun seluruhnya dikelola oleh masyarakat, namun keterlibatan pemerintah desa juga diperlukan dalam pengelolaan dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat desa. Pemerintah desa juga ikut andil dalam melihat potensi desa untuk dikembangkan masyarakat sehingga menjadi unit-unit BUMDes Maju Bersama.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan diatas. Skripsi ini membahas tentang Bagaimanakah Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes UKM Maju Bersama) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Air Buluh Kec.Ipuh Kab.Mukomuko. Dari permasalahan yang ada dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Dilihat dari hasil pembahasan di atas kesejahteraan masyarakat di Desa Air Buluh,Dampak dari keberadaan BUMDes di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten MukoMuko selama kurang lebih 4 tahun pada masyarakat sangat baik. BUMDes memberikan sebuah dampak tidak hanya kepada masyarakat namun juga berdampak untuk pemerintah desa, pelaksanaa BUMDes memberikan keuntungan materi sehingga dapat meningkatkan pendapatan desa, dengan pendapatan desa yang bertambah akan melaksanakan pembangunan yang sebelumnya tidak terlaksana karena pendanaan yang kurang. Perkembangan unit BUMDes sangat baik, dapat terlihat dengan asset-aset yang



dimiliki BUMDes terus bertambah. Oleh sebab itu apabila BUMDes dikelola dengan baik maka berdampak dengan alur tata kelola Dana Desa akan berdampak dengan baik juga (Darmi, T., & Mujtahid, 2019). Selain itu, akan berdampak dengan tata kelola pemerintahan yang baik (Darmi, T. (2016).

BUMDes memeberikan kesejahteraan terhadap perekonomian masyarakat, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Kreativitas masyarakat dapat disalurkan melalui BUMDes untuk terus meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten MukoMuko baik dari tingkat ekonomi, kesehatan dan pendidikan masyarakat sudah dapat dikatakan mengalami peningkatan bahkan masuk dalam kategori sejahtera dan baik. dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes UKM ) telah berdiri dari tahun 2016 di Desa Air Buluh sudah memiliki dampak yang memaksimal, perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti yang tercantum dalam UU No.6 Tahun 2014. Kesejahteraan yang suda merata bagi masyarakat diDesa Air Buluh yang telah diuraikan.

#### **DAFTAR RUJUKAN**

- Coristya, Heru, Suwondo. "Keberadaan BUMDes sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Bau, Kabupaten Malang," *Jurnal Administrasi Publik (JAP,)* Volume I Nomor 6.
- Darmi, T., & Mujtahid, M.M. ( 2019). Peningkatan Kapasitas Kebijakan Dana Desa Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS)*. Vol 3, No 1. Pp. 547 – 566.
- Darmi, T. (2016). Penerapan Prinsip Good Governance Untuk Layanan Publik. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, Vol 4, No 2. Pp. 97-102
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). 2007. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes )*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya
- Dr.Ni'matul Huda, S. M. (2015). *Hukum Pemerintahan Desa* . Malang: Setara Press
- Dunn, William. 1998. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Fitriska, K. (2003). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara. *Naskah Publikasi*, (130563201023), 1–21
- Ginandjar Kartasasmita. 1996. *Pembangunan untuk rakyat : Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*. Jakarta : PT.Pustaka Cidesindo
- Harry Hikmat. 2001. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung : Humaniora Utama Press

- Kurniawan, Ade Eka. 2016. "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes ) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2015)", Jurnal Ilmu Pemerintahan
- Maryunani. 2008. *Pembangunan BUMDes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Mubyarto. 1997. *Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media
- Muhammad, S. 2012. *Strategi Pemerintahan: Manajemen Organisasi Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015, tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan FE Brawijaya. (2007). *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes )*. PP RPDN.
- Rizka Hayyuna. 2016. "Inisiasi Pembentukan BUMDes Bersama untuk Meningkatkan Perekonomian Desa". Di Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang.
- Steiner, G. A., & Miner, J. B. 1997. *Kebijakan dan Strategi Manajemen (edisi kedua)*. Jakarta : Erlangga
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung : Alfabeta.
- Zulkarnaen, R. M. 2016. Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes ) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, 5(1), 1–4.